



KPK SUPERVISI OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH

Tahun Depan PAD Kota Yogya Ditarget Tembus Rp 1 Triliun

YOGYA (KR) - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogya pada tahun depan ditargetkan mampu menembus angka Rp 1 triliun. Hal itu berkaitan dengan upaya optimalisasi potensi dan proyeksi pendapatan daerah yang bakal dilakukan. Apalagi Kota Yogya juga mendapatkan supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selama ini PAD Kota Yogya belum pernah mampu menembus angka Rp 1 triliun. Sehingga jika target pada tahun 2025 mampu terpenuhi maka akan menjadi capaian positif bagi jajaran aparaturnya Pemkot Yogya. "Kami akan pertajam lagi pada tahun 2025 sehingga pendapatan daerah kami targetkan satu triliun rupiah," tan-

das Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogya Ir Aman Yuridijaya MM, Jumat (17/5).

Pada tahun ini pendapatan asli daerah di Kota Yogya ditargetkan Rp 800 miliar, terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kenaikan target hingga Rp 200 miliar pada tahun depan tentu akan menjadi pekerjaan yang ti-

dak ringan bagi aparaturnya. Terutama di sejumlah instansi yang mengampu pajak daerah dan retribusi daerah. Terlebih, sejumlah retribusi yang tahun lalu dipungut namun mulai tahun ini dibebaskan seiring undang-undang perihal keuangan pemerintah daerah. Di antaranya seperti retribusi uji kendaraan,

retribusi tera ulang dan lainnya.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, mengungkapkan berkaitan optimalisasi pendapatan daerah jajarannya sudah berkoordinasi dengan tim KPK yang melakukan supervisi. Pihaknya juga telah berkomitmen melakukan optimalisasi pajak dengan meningkatkan target pendapatan daerah setiap tahun. "Pada tahun 2023 Pemkot mendapatkan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan skor 81,3 dan baru diumumkan oleh KPK kemarin. Nilai itu meru-

pakan yang tertinggi di DIY. Selain menjadi komitmen kami dalam pemberantasan korupsi juga menjadi perhatian dan konsen untuk meningkatkan pendapatan daerah," urainya.

Menurutnya dari koordinasi dengan KPK, Pemkot Yogya banyak mendapatkan masukan dan arahan terkait optimalisasi pendapatan daerah. Hal yang menjadi perhatian terkait masukan KPK ialah melakukan kajian proyeksi pendapatan daerah sebagai pedoman dan evaluasi meningkatkan target pendapatan daerah. "Kajian

potensi (proyeksi) pendapatan perlu dilakukan segera supaya bisa mengetahui sebetulnya potensi pendapatan kita berapa. Jadi untuk menentukan target (pendapatan) itu lebih enak," imbuhnya.

Sementara Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI Bahtiar Ujang Purnama, menyatakan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dalam rangka melaksanakan pemberantasan korupsi secara bersama-sama. Di samping itu pihaknya juga akan menyampaikan terkait optimalisasi pendapatan daerah. Terutama

pentingnya membuat kajian proyeksi sektor pendapatan sebagai pedoman evaluasi untuk meningkatkan pendapatan.

Untuk melakukan hal tersebut Pemkot Yogya bisa melibatkan praktisi untuk membuat kajian proyeksi pendapatan secara berkala minimal dua tahun sekali. Termasuk membenahi sistem administrasi pajak daerah. "Kami juga mengingatkan untuk melakukan evaluasi terhadap badan usaha milik daerah dan badan layanan usaha daerah untuk optimalisasi pendapatan," katanya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005